

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rusia dan Jerman memiliki hubungan energi yang erat, terutama dalam hal pasokan minyak bumi, meskipun hubungan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi global. Sejak era Perang Dingin, Jerman telah menjadi salah satu importir terbesar energi dari Rusia, yang memasok minyak dan gas melalui jaringan pipa besar seperti *Nord Stream*. Meskipun ada ketegangan politik, seperti setelah aneksasi Krimea dan invasi Rusia ke Ukraina, perdagangan energi tetap berjalan karena ketergantungan Jerman pada minyak dan gas Rusia untuk kebutuhan industrinya. Di sisi lain, Jerman juga sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada energi fosil melalui inisiatif *Energiewende*. Namun, proses ini memerlukan waktu, sehingga impor energi dari Rusia masih krusial. Proyek *Nord Stream 2* menimbulkan kontroversi dan tekanan politik dari AS dan beberapa negara Eropa Timur, namun konflik di Ukraina pada tahun 2022 membuat Jerman akhirnya menghentikan proyek tersebut. Hubungan energi antara kedua negara ini selalu berada di antara kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan ketegangan politik yang dinamis.

Melanjutkan hubungan energi antara Rusia dan Jerman, salah satu pilar utama ketergantungan ini adalah gas alam, di mana Jerman menjadi salah satu konsumen terbesar gas Rusia. Hal ini terutama terlihat melalui proyek infrastruktur seperti *Nord Stream* dan *Nord Stream 2*, yang bertujuan untuk memperkuat akses langsung ke pasokan energi Rusia, meminimalkan ketergantungan pada jalur transit yang sering tidak stabil, seperti Ukraina.

Perkembangan geopolitik dan perubahan lanskap energi global telah memunculkan tantangan baru bagi hubungan energi ini. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 menjadi momen penting yang menggeser kebijakan energi Jerman secara drastis. Sebelum invasi, meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu Eropa lainnya untuk menghentikan

ketergantungan pada energi Rusia, Jerman tetap mempertahankan posisinya dalam proyek *Nord Stream 2*, menekankan pentingnya pasokan energi stabil untuk mendukung perekonomiannya yang kuat.

Setelah invasi, Jerman terpaksa menghentikan persetujuan operasional *Nord Stream 2* sebagai bagian dari sanksi internasional terhadap Rusia. Ini menandai perubahan besar dalam pendekatan Jerman terhadap Rusia, terutama dalam hal energi. Dalam situasi ini, Jerman mulai mempercepat transisinya ke energi terbarukan serta mencari alternatif sumber energi, seperti impor gas alam cair (LNG) dari negara-negara lain.

Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada energi Rusia juga mengungkap kelemahan strategis bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Krisis energi yang terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina menunjukkan betapa rentannya Jerman dan beberapa negara Eropa terhadap guncangan pasokan energi. Ini memaksa pemerintah Jerman untuk mempercepat implementasi kebijakan *Energiewende* dan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan hidrogen hijau, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas dari Rusia (Rifky, 2020)

Pada akhirnya, hubungan energi antara Rusia dan Jerman semakin diwarnai oleh ketidakpastian. Meskipun kerja sama energi selama bertahun-tahun telah memberi manfaat ekonomi bagi kedua negara, tekanan geopolitik yang terus meningkat serta ambisi Jerman untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan telah menciptakan ketegangan yang signifikan. Masa depan hubungan energi ini akan sangat bergantung pada bagaimana situasi geopolitik berkembang, serta sejauh mana Jerman dapat mewujudkan transisinya menuju energi bersih dan mengurangi ketergantungannya pada sumber energi fosil dari Rusia.

Hubungan antara Jerman dan Ukraina dalam bidang energi, khususnya minyak bumi, semakin signifikan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, Jerman sangat tergantung

pada energi Rusia, terutama gas alam, yang diimpor melalui pipa seperti Nord Stream. Konflik yang terjadi menyebabkan Rusia membatasi pasokan energi ke Eropa, memaksa Jerman untuk mengurangi ketergantungan ini dan mencari sumber energi alternatif.

Ukraina, yang merupakan jalur transit utama gas Rusia, juga terdampak, tetapi di sisi lain melihat kesempatan untuk memperkuat kemitraan energi dengan Eropa, khususnya Jerman. Dengan potensi besar dalam energi terbarukan, Ukraina berharap dapat memberikan solusi bagi krisis energi di Eropa. Jerman memberikan dukungan kepada Ukraina dalam membangun kembali infrastrukturnya yang rusak akibat perang, termasuk melalui transfer teknologi energi terbarukan. Selain itu, Jerman juga mengalihkan fokus pada energi LNG dan memperkuat kerja sama dengan produsen minyak lainnya di luar Rusia.

Kolaborasi energi ini tidak hanya membantu Jerman mengamankan pasokan energi, tetapi juga membantu Ukraina memulihkan sektor energinya dan mengurangi ketergantungan pada Rusia. Hubungan energi antara Jerman dan Ukraina menjadi semakin penting setelah perang Rusia-Ukraina, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Rusia. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Jerman dan banyak negara Eropa lainnya sangat bergantung pada pasokan gas alam Rusia yang dialirkan melalui pipa Nord Stream dan jaringan pipa lainnya. Namun, setelah perang pecah, Rusia secara strategis membatasi atau memutus pasokan energi, yang memperparah krisis energi di Eropa. Akibatnya, Jerman terpaksa mencari alternatif untuk menggantikan ketergantungan yang selama ini dimiliki pada Rusia.

Ukraina, yang selama bertahun-tahun menjadi jalur transit utama bagi gas Rusia yang dikirim ke Eropa, juga mengalami dampak besar akibat perang. Infrastruktur energi Ukraina rusak akibat serangan Rusia, yang membuat aliran energi ke Eropa terganggu. Namun, di tengah krisis tersebut, Ukraina melihat peluang besar untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara Eropa, termasuk Jerman, melalui kolaborasi di sektor energi. Ukraina memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya, yang dapat membantu

mengatasi krisis energi Eropa dan mendukung transisi Jerman menuju penggunaan energi hijau.

Untuk Jerman, transisi ke energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi menjadi prioritas utama pasca perang. Jerman mulai beralih dari ketergantungan pada gas dan minyak Rusia dan berupaya mempercepat investasi dalam energi terbarukan. Salah satu bentuk dukungan nyata Jerman adalah membantu Ukraina dalam membangun kembali infrastruktur energi yang rusak, terutama melalui transfer teknologi dan pengetahuan dalam bidang energi terbarukan. Jerman melihat potensi besar dalam kerja sama ini, baik untuk keamanan energi mereka sendiri maupun untuk memperkuat stabilitas energi di kawasan Eropa Timur.

Selain kerja sama dalam energi terbarukan, Jerman juga mulai berinvestasi dalam infrastruktur LNG (liquefied natural gas) dan memperluas jaringan impor energi dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan Jerman dan negara-negara Eropa lainnya memiliki cadangan energi yang cukup tanpa harus bergantung pada pasokan dari Rusia. Dalam konteks ini, hubungan Jerman dengan Ukraina menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi di Eropa.

Kerja sama energi antara Jerman dan Ukraina juga mencakup bantuan keuangan dan teknis dari Jerman untuk mendukung Ukraina dalam memperbaiki sistem jaringan listrik dan fasilitas energi yang rusak akibat perang. Bantuan ini tidak hanya berdampak positif bagi Ukraina yang sedang berjuang memulihkan ekonominya, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Eropa untuk memastikan aliran energi yang stabil dan aman di seluruh kawasan. Ukraina, dengan dukungan dari Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, berharap dapat mempercepat transisinya ke energi terbarukan dan meminimalisir ketergantungan pada sumber energi fosil dari Rusia.

Kerjasama energi ini juga berfungsi sebagai upaya Jerman dan Uni Eropa untuk membatasi pengaruh Rusia di sektor energi. Rusia, selama bertahun-tahun, menggunakan energi sebagai senjata politik untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara-negara Eropa, terutama yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Dengan mengurangi ketergantungan ini dan memperkuat hubungan dengan Ukraina, Jerman dan Eropa berharap dapat menciptakan kemandirian energi yang lebih besar serta meningkatkan stabilitas di kawasan tersebut.

Hubungan antara Jerman dan Ukraina dalam sektor energi terus berkembang dan menjadi semakin krusial setelah perang Rusia-Ukraina. Dengan kerjasama di bidang energi terbarukan, infrastruktur LNG, dan dukungan finansial serta teknis, Jerman dan Ukraina berupaya menciptakan masa depan energi yang lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan di Eropa.

Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Jerman sangat signifikan dan kompleks, mencerminkan ketergantungan negara tersebut pada energi, dinamika pasar global, dan perubahan kebijakan internasional. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa telah menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, inflasi, dan stabilitas industri.

Ketergantungan Energi Jerman menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk dampak perang ini adalah ketergantungan Jerman pada gas alam Rusia. Sebelum konflik, sekitar 55% gas yang digunakan Jerman berasal dari Rusia. Ketergantungan ini membuat Jerman rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga energi. Setelah invasi, Rusia mulai membatasi pasokan gas ke Eropa sebagai respons terhadap sanksi yang diterapkan oleh negara-negara Barat. Hal ini menyebabkan lonjakan harga energi yang drastis dan mengancam keberlangsungan industri di Jerman, yang sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil dan terjangkau.

Lonjakan harga energi di Eropa mencapai rekor tertinggi setelah invasi, dengan harga gas di Jerman menjadi tiga hingga lima kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan Amerika Serikat dan empat kali lebih mahal dibandingkan dengan Prancis yang memiliki sumber energi nuklir melimpah. Dalam laporan oleh Kamar Dagang dan Industri Jerman (DIHK), diperkirakan bahwa biaya ekonomi akibat perang ini dapat mencapai sekitar 160 miliar euro atau sekitar 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman pada tahun 2023. Lonjakan biaya ini berdampak langsung pada daya saing industri Jerman di pasar global.

Dampak pada pertumbuhan ekonomi Pada akhir tahun 2022, perekonomian Jerman mengalami kontraksi sebesar 0,2% pada kuartal terakhir, setelah sebelumnya menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,8% sepanjang tahun tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran konsumen dan dampak dari krisis energi. Ekonom memperkirakan bahwa tanpa perang, pertumbuhan ekonomi Jerman seharusnya lebih baik, dengan proyeksi pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. Selain itu, inflasi di Jerman juga melonjak tinggi; pada September 2022, inflasi mencapai 10%, sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga energi

Akibat dari berbagai faktor tersebut, banyak analis memperkirakan bahwa Jerman akan menghadapi resesi singkat. Prediksi menunjukkan penurunan output ekonomi setengah persen untuk tahun 2023 secara keseluruhan. Resesi ini dipicu oleh kombinasi dari biaya energi yang tinggi dan ketidakpastian pasar global akibat perang. Meskipun pemerintah Jerman telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ini melalui pembatasan harga energi dan mencari alternatif pasokan energi, dampaknya tetap terasa dalam jangka pendek.

Sebagai respons terhadap krisis ini, pemerintah Jerman telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia dengan mencari sumber energi alternatif. Langkah-langkah ini termasuk mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan dan meningkatkan impor gas dari negara lain. Namun, proses transisi ini tidak mudah dan memerlukan waktu serta investasi yang signifikan

Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dimensi perekonomian yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi di Jerman serta dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Jerman setelah perang Rusia-Ukraina & bagaimana Jerman mengatasi masalah terkait dengan pasokan energi setelah perang Rusia-Ukraina.

2. Rumusan Masalah

Karena hal tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perang Rusia-Ukraina mempengaruhi pasokan energi Jerman?
- b) Bagaimana dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Jerman 2022-2023?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pasokan energi Jerman setelah perang Rusia-Ukraina
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Jerman sebelum dan setelah Perang Rusia-Ukraina.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dapat di peroleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah pemahaman mengenai dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Jerman pada tahun 2022-2023 & bagaimana mengatasi krisis energi di Jerman.

- b. Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional untuk melanjutkan studinya di bidang hubungan internasional.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa yaitu konsep konflik antar negara dan geopolitik, konsep keamanan energi dan konsep perdagangan internasional, Untuk menjelaskan variabel topik yang akan di teliti. Konsep konflik antar negara dan geopolitik untuk menjelaskan bagaimana perang antar Rusia-Ukraina serta geopolitik negara Jerman. Sedangkan konsep keamanan energi untuk menjelaskan bagaimana Jerman memiliki jaminan pasokan energi. Sedangkan konsep perdagangan internasional untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Jerman, berikut adalah uraian mengenai konsep teori tersebut :

- a. Konsep Realisme.

Konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi yang kemudian menimbulkan ketegangan atau pertentangan. Konflik dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari individu, kelompok, hingga antarbangsa, dan biasanya muncul akibat perbedaan pandangan, komunikasi yang kurang efektif, atau persaingan atas sumber daya tertentu. Konflik tidak selalu bersifat negatif, karena dalam beberapa situasi, konflik dapat mendorong inovasi, perubahan sosial, dan perbaikan hubungan jika dikelola dengan baik.

K. J. Holsti mendefinisikan konflik internasional sebagai pertentangan antara tuntutan yang dimiliki oleh satu negara dengan kepentingan negara lain. Dalam pandangan Holsti, konflik ini muncul ketika dua negara atau lebih memiliki kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat berujung pada ketegangan atau bahkan perang (K. J. Holsti, 1996).

Menurut Pruitt dan Rubin, konflik didefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest). Dalam konteks ini, konflik dapat terjadi ketika

satu pihak merasa bahwa kepentingannya terancam oleh tindakan pihak lain, yang dapat berujung pada ketegangan atau konfrontasi (Pruitt & Rubin, 2009).

Coser menjelaskan bahwa konflik adalah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status dan kekuasaan, dengan tujuan untuk menetralkan, mencederai, atau bahkan melenyapkan lawan. Definisi ini menekankan pada aspek nilai dan kekuasaan dalam hubungan antar negara (Lewis A. Coser, 1956).

Soekanto mengelompokkan konflik menjadi beberapa jenis, termasuk konflik internasional yang terjadi akibat perbedaan kepentingan yang mempengaruhi kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa konflik bisa muncul dari berbagai faktor seperti politik, ekonomi, dan sosial (Soerjono Soekanto, 2006).

Pengertian konflik antar negara bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing ahli. Namun, secara umum, dapat disimpulkan bahwa konflik ini sering kali berakar dari perbedaan kepentingan, nilai, dan kekuasaan antara negara-negara yang terlibat. Konflik ini bisa bersifat terbuka atau tersembunyi dan dapat berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik

b. Konsep keamanan energi.

Secara tradisional, fokus dalam studi keamanan adalah isu-isu militer di tingkat negara. Namun, perubahan dinamika sejak masa Perang Dingin membuat ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia mengalami perkembangan dan turut mencakup isu-isu non-militer seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, penyakit menular, bencana alam, kejahatan transnasional, perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, dan migrasi massal yang dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari domestik hingga global. Sebagai prasyarat keberlangsungan aktivitas militer, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan, energi menjadi salah satu isu keamanan non-tradisional yang penting untuk dikaji (Banerjee & Basu, 2022; Brauch, 2009).

Konsep keamanan energi mulai menarik perhatian para akademisi sejak tahun 1960-an dan berkembang pesat pasca-krisis minyak pada tahun 1973 dan 1979. Daniel Yergin (1988) mendefinisikan keamanan energi sebagai ketersediaan pasokan minyak yang memadai dan andal dengan harga yang masuk akal serta tidak mengancam nilai dan kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara. Sama seperti Daniel Yergin, definisi keamanan energi yang dikemukakan oleh E. William Colglazier dan David Deese (1983) turut berfokus pada ketersediaan minyak sebagai sumber energi utama, tetapi definisi ini juga mempertimbangkan gangguan dalam proses produksi dan distribusi serta intervensi dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pihak swasta sebagai faktor kunci yang dapat mengancam keamanan energi suatu negara.

Kembalinya stabilitas harga pasar global dan menurunnya ancaman ekonomi-politik terkait perdagangan minyak sempat membuat studi keamanan energi sepi peminat. Akan tetapi, meningkatnya permintaan pasar Asia, gangguan dalam pasokan energi Eropa, dan tekanan yang kian besar untuk menciptakan sistem energi yang rendah karbon kembali meningkatkan minat akademisi terhadap studi keamanan energi pada awal abad ke-21 (Cherp & Jewell, 2014). Berbeda dengan studi keamanan energi klasik yang menganggap bahwa pasokan minyak dan hambatan ekonomi-politik merupakan satu-satunya hal yang harus diperhatikan untuk menjamin keamanan energi, studi keamanan energi kontemporer berusaha menaungi berbagai alternatif sumber energi, isu-isu sosial terkait akses energi, dan perubahan iklim dalam kajiannya (Goldthau, 2011).

Pergeseran fokus studi keamanan energi turut direfleksikan oleh perubahan definisi yang dirumuskan oleh berbagai pihak, seperti United Nations Development Programme (2000) yang mendefinisikan keamanan energi sebagai ketersediaan berbagai bentuk sumber energi dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang wajar; World Bank Group (2005) yang mendefinisikan keamanan energi sebagai kemampuan untuk memproduksi dan menggunakan

berbagai sumber energi dengan biaya yang wajar dan dengan cara yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat; Sam Raphael dan Doug Stokes (2013) yang mendefinisikan keamanan energi sebagai ketersediaan berbagai sumber energi yang mampu menyediakan pasokan energi yang cukup, stabil, dan andal untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan militer, ekonomi, dan sosial hingga di masa yang akan datang; dan International Energy Agency (2019) yang mendefinisikan keamanan energi sebagai keberlanjutan berbagai sumber energi dengan memperhatikan efek jangka panjang (investasi yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan) dan jangka pendek (kemampuan sistem untuk merespon perubahan pasokan dan permintaan) yang ditimbulkan.

Mengamankan pasokan energi melalui upaya diversifikasi dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan merupakan pemahaman umum yang dimiliki oleh negara-negara di dunia terkait konsep keamanan energi. Namun, konsep ini juga dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh negara yang berbeda, tergantung posisi dan kepentingan yang dimiliki. Bagi negara-negara produsen dan pengeksport, keamanan energi berpusat pada stabilitas harga jual dan permintaan pasar serta potensi pemanfaatan energi sebagai instrumen untuk mengontrol perilaku, menghukum, dan memperoleh konsesi politik. Bagi negara-negara konsumen dan pengimpor, keamanan energi berpusat pada ketersediaan pasokan yang tidak terputus dengan harga beli yang wajar serta kemampuan untuk mengatasi ancaman hambatan dalam proses distribusi dan mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara pengeksport (Brauch, 2009; Klare, 2008; Yergin, 2006).

Dengan mengacu pada sejumlah definisi konseptual terkait konsep energy security yang telah diuraikan, dirumuskan sebuah definisi operasional: keamanan energi adalah jaminan atas ketersediaan berbagai sumber energi secara terus-menerus dengan memperhatikan kemudahan akses, keterjangkauan biaya produksi dan konsumsi, serta keberlanjutan penggunaan demi

mendukung pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan. Definisi konseptual dan operasional tersebut akan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis keterkaitan antara pembatasan ekspor gas alam pasca invasi Rusia ke Ukraina dan krisis energi yang terjadi di Jerman serta berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh krisis energi tersebut.

c. Konsep perdagangan internasional

Perdagangan Internasional adalah rangkaian proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak yang sifatnya sukarela dari masing-masing negara yang terlibat. Alasan utama dari kegiatan perdagangan ini adalah untuk memperoleh gains off trade atau manfaat perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang sangat penting dewasa ini, oleh karena itu, tidak ada negara negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik yang sifatnya perdagangan antar-regional, antar-kawasan, ataupun antar-negara. Terdapat berbagai alasan mengapa negara atau pelaku perdagangan melakukan transaksi dagang. Pada faktanya bahwa perdagangan internasional telah menjadi salah satu langkah penting bagi banyak negara untuk dapat menjadi suatu negara yang kaya, kuat dan sejahtera (Aprita & Adhitya, 2020).

Negara-negara melakukan perdagangan internasional oleh karena dua alasan dasar. Pertama, negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa, seperti halnya dengan manusia, dapat memperoleh manfaat dari perbedaan yang mereka miliki dengan mencapai kesepakatan agar masing masing negara menjual produk andalan mereka yang tidak diproduksi negara lainnya, sehingga dapat menguntungkan masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Kedua, negara-negara melakukan perdagangan untuk mencapai skala paling efisien dalam proses produksi. Daripada sebuah negara memproduksi semua jenis barang secara tidak maksimal, lebih baik fokus dalam memproduksi barang-barang tertentu yang menjadi keunggulan mereka dan 10 mengimpor barang-barang

lain yang bukan menjadi keunggulan mereka. Dengan demikian, produksi akan lebih efisien, bahkan berpotensi untuk meningkatkan nilai ekspor negara (Krugman & Obstfeld, 2003).

Ketika suatu negara melakukan praktik perdagangan internasional, maka harga produk domestik akan disetarakan dengan harga dunia. Hal ini dikarenakan tidak ada penjual yang mau menjual produk dengan harga lebih rendah dari harga dunia, dan tidak akan ada konsumen yang mau membayar lebih dari harga dunia. Oleh karena itu, membandingkan harga domestik dengan harga dunia sebelum melakukan perdagangan internasional penting dilakukan untuk melihat apakah suatu negara memiliki "Comparative Advantage" atau "keunggulan komparatif" dalam memproduksi suatu barang atau tidak. Jika harga domestik suatu negara terhadap satu komoditas lebih rendah daripada harga dunia, maka harga produksinya juga lebih rendah. Hal ini berarti negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi komoditas tersebut dibandingkan negara lainnya. Hal ini juga berarti bahwa negara tersebut mampu menjadi eksportir, karena produsen komoditas dalam negeri dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada negara lainnya (Mankiw, 2021). Teori mengenai Comparative Advantage ini diciptakan oleh David Ricardo di abad ke-19 untuk memperbaiki teori sebelumnya mengenai Absolute Advantage yang dibuat oleh Adam Smith. Ricardo melalui teori keunggulan komparatifnya memandang bahwa negara yang tidakju memiliki keunggulan absolut sekalipun dapat melakukan perdagangan internasional (Montevirgen, 2024).

Membahas mengenai perdagangan internasional otomatis akan membahas mengenai praktik ekspor dan impor. Secara sederhana, kegiatan ekspor dan impor bermakna sebagai transaksi jual beli antar negara yang saling membutuhkan, baik dalam bentuk jasa maupun komoditas. Istilah ini menggambarkan situasi jual-beli dalam praktek perdagangan internasional. Sederhananya, negara akan mengalami surplus ketika nilai ekspornya lebih banyak dibandingkan nilai impornya, sebaliknya, negara akan rugi bila nilai impornya lebih besar dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan. Ekspor merupakan aktivitas perdagangan

barang yang tujuan pengirimannya ke luar negeri. Sementara itu, impor didefinisikan sebagai aktivitas pembelian produk luar negeri, kemudian dipakai atau diperdagangkan kembali di dalam negeri (Latif, Mardiana, & Yusuf, 2022).

Kegiatan ekspor dan impor masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Dengan melakukan ekspor, maka akan memberi efek positif seperti, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa negara, serta dapat memperluas pasar. Meski demikian, ekspor juga memberi dampak negatif bagi negara, seperti menimbulkan kelangkaan barang dalam negeri, menyebabkan eksploitasi besar-besaran bagi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Sama halnya seperti ekspor, kegiatan impor yang dilakukan oleh negara juga memberi dampak positif dan negatif bagi negara. Dampak positifnya, impor dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat dapat membeli barang-barang yang tidak mampu diproduksi di dalam negeri, lalu dapat meningkatkan kegiatan industri dalam negeri, terlebih jika bahan baku dalam industri tersebut berasal dari luar negeri. Selanjutnya, impor juga dapat memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap dan mengurangi ketertinggalan dari negara lain. Selanjutnya, dampak negatif dari impor itu sendiri adalah dapat membuat industri dalam negeri kalah saing, serta dapat menciptakan sifat konsumerisme bagi masyarakat (Aprita & Adhitya, 2020).

Metodologi Penelitian

Tipe Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian Jerman 2022-2023 di Jerman. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, kejadian, kondisi, atau variabel tertentu tanpa mengubah atau memanipulasi variabel tersebut. Penelitian ini fokus pada penyajian data yang tepat dan

objektif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, seperti peristiwa, situasi, aktivitas, atau pola-pola yang muncul dalam masyarakat.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menguraikan dan merinci data yang diperoleh dalam bentuk kualitatif, yang kemudian diolah untuk menghasilkan gambaran analisis yang mendalam dan kaya, serta memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang inti dari fenomena yang sedang diteliti.

Jenis data yang akan digunakan penulis pada proses penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang sudah ada atau data-data tersebut telah dikumpulkan oleh lembaga serta organisasi penyelidik sebelumnya. Data-data sekunder dapat diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, Undang-Undang Negara, situs jejaring resmi, serta sumber elektronik yang memuat tentang bagaimana kebijakan Jerman dalam menghadapi krisis energi

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yakni dokumen atau catatan dari peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang yang tentunya relevan dengan topik yang diangkat oleh Peneliti

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif yaitu data yang penulis dapatkan bukan berbentuk numerik atau data-data yang berbentuk angka melalui beberapa faktor-faktor yang relevan dengan penelitian ini, Yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut.

Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang hubungan energi antara Jerman dan Rusia, ketergantungan Jerman pada gas alam Rusia, serta dampak besar yang terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Penulis merumuskan masalah terkait gangguan pasokan energi dan dampaknya terhadap ekonomi Jerman. Disertakan juga tujuan, manfaat penelitian, kerangka teoritis (realisme dan liberalisme), serta metode kualitatif yang digunakan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan konsep-konsep utama yang digunakan seperti teori konflik, keamanan energi, dan perdagangan internasional. Bab ini juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung landasan teori dan analisis.

BAB 3 Gambaran Umum, Bab ini menjelaskan profil Jerman, hubungan politik dan ekonomi Jerman-Rusia, kerja sama Jerman-Ukraina, serta posisi Jerman dalam konflik. Bab ini memberikan konteks geopolitik yang penting untuk memahami transformasi kebijakan Jerman.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan, Bab ini merupakan inti skripsi yang memaparkan terkait dengan dampak konflik terhadap keamanan energi Jerman, perubahan kebijakan energi Jerman (seperti pengembangan *Liquefied Natural Gas* dan energi terbarukan) dan dampak ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi, kontraksi PDB, dan gangguan industri.

BAB 5 Penutup, Bab terakhir ini merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan memberikan saran. Berisi kesimpulan dari analisis bahwa konflik telah memicu perubahan besar dalam kebijakan energi dan arah ekonomi Jerman. Saran diberikan untuk kebijakan energi dan strategi mitigasi dampak ekonomi di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Realisme dalam konflik Rusia-Ukraina

Konflik antar negara merupakan salah satu isu sentral dalam studi Hubungan Internasional yang muncul ketika dua atau lebih negara memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan tidak dapat didamaikan melalui jalur diplomatik. Konflik antara Rusia dan Ukraina dianalisis sebagai bentuk nyata dari konflik internasional, di mana tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina dipandang sebagai respons atas meningkatnya ancaman terhadap kepentingan geopolitik dan keamanan nasional Rusia, khususnya akibat kedekatan Ukraina dengan NATO dan Uni Eropa.

Menurut Holsti (1996), konflik internasional merupakan pertentangan antara tuntutan yang dimiliki oleh satu negara dengan kepentingan negara lain, dan biasanya dipicu oleh perbedaan pandangan politik, distribusi kekuasaan, serta klaim atas sumber daya strategis. Dalam konteks ini, invasi Rusia ke Ukraina dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan pengaruh di kawasan Eropa Timur yang dianggap sebagai “near abroad” oleh Rusia. Pendekatan realisme menjadi salah satu kerangka paling relevan untuk memahami dinamika konflik semacam ini karena menempatkan negara sebagai aktor utama yang rasional dan berusaha memaksimalkan kekuasaan serta keamanannya dalam sistem internasional yang anarkis.

Realisme, baik dalam bentuk klasik maupun neorealisme, menekankan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan seringkali menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979). Dalam kerangka ini, aneksasi Krimea pada 2014 dan invasi penuh pada 2022 dapat dilihat sebagai upaya Rusia untuk menghindari kehilangan pengaruh strategis dan untuk mengimbangi dominasi Barat di kawasan yang selama ini berada di bawah orbit pengaruhnya. Seperti dijelaskan oleh Mearsheimer (2014), negara-negara besar secara inheren bersifat ofensif karena tidak pernah bisa sepenuhnya mempercayai niat negara lain; oleh karena itu, Rusia mengambil langkah preventif dengan menyerang Ukraina demi mempertahankan ruang strategis.

Tindakan Rusia juga menegaskan kegagalan institusi internasional seperti PBB dan OSCE dalam mencegah agresi militer, sejalan dengan pandangan realis bahwa organisasi internasional hanya mencerminkan kepentingan negara-negara besar dan tidak memiliki kapasitas efektif dalam mengekang perilaku negara (Waltz, 1979). Bahkan ketika Dewan Keamanan PBB mengutuk invasi, Rusia sebagai anggota tetap dapat memveto resolusi yang merugikan kepentingannya. Hal ini semakin menguatkan klaim realisme tentang pentingnya kekuatan militer dan kekuasaan struktural dalam menjaga kepentingan nasional.

Dampak dari konflik Rusia-Ukraina turut dirasakan oleh negara-negara lain, termasuk Jerman, yang mengalami krisis energi akibat ketergantungan tinggi pada impor gas alam dari Rusia. Ketergantungan ini menempatkan Jerman dalam posisi geopolitik yang kompleks dan memaksa negara tersebut untuk melakukan diversifikasi energi serta mempercepat transisi ke energi terbarukan. Langkah-langkah ini dalam kacamata realisme, merupakan bentuk adaptasi strategis dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan nasional, bukan sekadar pilihan idealis untuk keberlanjutan energi.

Konflik ini menunjukkan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, tidak ada jaminan keamanan absolut. Negara akan terus mencari cara untuk mengamankan posisinya,

termasuk melalui ekspansi wilayah, peningkatan anggaran militer, dan pembentukan aliansi strategis. Realisme menjelaskan bahwa dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kekuatan tetap menjadi penentu utama dalam hubungan antarnegara, dan konflik merupakan konsekuensi logis dari pertarungan kepentingan di level global (Mearsheimer, 2014; Waltz, 1979). Dengan demikian, konflik Rusia-Ukraina tidak hanya mencerminkan dinamika geopolitik regional, tetapi juga mempertegas relevansi teori realisme dalam memahami konflik antar negara di era kontemporer. Negara tetap menjadi aktor dominan dalam sistem internasional, dan kekuasaan serta keamanan menjadi motivasi utama dalam perilaku politik luar negeri mereka.

Pengaruh geopolitik tercermin secara kuat dalam hubungan antara Rusia, Ukraina, dan Jerman yang terdampak secara signifikan oleh perubahan konstelasi kekuatan global dan regional. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, geopolitik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Rusia yang bertujuan untuk mempertahankan pengaruh regional serta mengamankan kepentingan strategisnya dari ancaman ekspansi Barat.

Secara konseptual dalam hubungan internasional, geopolitik sering kali dikaitkan dengan distribusi kekuasaan dan lokasi strategis suatu negara yang menentukan nilai militernya, ekonominya, dan posisinya dalam sistem internasional (Flint, 2006). Rusia memandang Ukraina bukan hanya sebagai negara tetangga, melainkan sebagai buffer zone yang krusial untuk keamanan nasionalnya. Sejak Ukraina menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, Rusia melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap kestabilan geopolitiknya di kawasan Eropa Timur. Tindakan Rusia dalam mencaplok Krimea dan menginvasi Ukraina secara militer pada 2022 adalah manifestasi dari upaya mempertahankan ruang pengaruh geopolitiknya di tengah tekanan dari negara-negara Barat.

Dalam perspektif teori realisme, dinamika geopolitik seperti ini sangat sesuai dengan asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, negara adalah aktor utama, dan kekuatan

merupakan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional (Waltz, 1979). Rusia bertindak sesuai logika realis dengan memperkuat posisi militernya untuk menolak dominasi Barat di wilayah yang dianggap sebagai *sphere of influence*. Realisme ofensif yang dikemukakan oleh Mearsheimer (2014) menjelaskan bahwa negara-negara besar akan selalu berusaha mengamankan dominasi regional guna mencegah kemungkinan ancaman dari rivalnya. Oleh karena itu, geopolitik Rusia terhadap Ukraina sangat logis bila dilihat dari kaca mata realisme: memperluas dan mempertahankan pengaruh adalah bentuk pencapaian keamanan maksimal dalam sistem yang penuh ketidakpastian. Bagi Jerman, pengaruh geopolitik dari konflik ini sangat nyata dalam bentuk krisis energi. Sebagai negara yang sebelumnya sangat bergantung pada pasokan gas alam dari Rusia melalui jalur Nord Stream, Jerman menghadapi tekanan besar setelah invasi Rusia ke Ukraina. Rusia menggunakan energi sebagai alat politik untuk menekan negara-negara Uni Eropa, termasuk Jerman, yang memberikan sanksi ekonomi sebagai bentuk penolakan terhadap agresi militer tersebut, ini menunjukkan bagaimana geopolitik tidak hanya mempengaruhi hubungan militer atau diplomatik, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan energi dan ekonomi nasional.

Respon Jerman terhadap tantangan geopolitik ini yakni dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan dan memperluas sumber pasokan energi dari negara lain merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur kekuatan internasional. Dalam teori realisme, langkah ini menunjukkan bahwa negara bertindak berdasarkan perhitungan rasional terhadap ancaman eksternal dan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan (Morgenthau, 1948). Geopolitik dalam hal ini tidak hanya menentukan strategi militer dan keamanan, tetapi juga kebijakan domestik yang berkaitan dengan ketahanan energi dan ekonomi.

Selain itu, geopolitik konflik Rusia-Ukraina juga memicu pergeseran posisi strategis Jerman dalam sistem internasional. Jerman mulai meninggalkan kebijakan luar negeri yang cenderung pasif pasca-Perang Dunia II dan meningkatkan anggaran pertahanannya secara

drastis sebagai respons terhadap ancaman dari Rusia. Langkah ini sesuai dengan pandangan realis bahwa ancaman nyata mendorong negara untuk memperkuat kapasitas militernya demi mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasional (Waltz, 1979). Secara keseluruhan, konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap Jerman menunjukkan bahwa faktor geopolitik tetap menjadi elemen penting dalam Hubungan Internasional. Perubahan dalam peta kekuasaan dan lokasi strategis negara-negara di kawasan tertentu dapat memicu ketegangan, memengaruhi kebijakan luar negeri, dan mengubah orientasi strategis suatu negara. Dalam kerangka teori realisme, semua perubahan ini adalah bentuk kalkulasi rasional dari negara-negara yang berusaha mempertahankan kepentingannya dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi dan selalu berpotensi konflik.

Berbeda dengan pandangan realis yang menekankan anarki dan perebutan kekuasaan, liberalisme dalam HI melihat bahwa konflik antarnegara bersifat tidak pasti dan dapat diminimalisasi melalui kerja sama dan institusi. Tokoh klasiknya, Immanuel Kant (1795), misalnya, berargumen bahwa perdamaian abadi tercapai jika setiap negara menganut "*konstitusi sipil republik*" dan tunduk pada "*federasi negara-negara merdeka*". Prinsip ini mengarah pada gagasan demokrasi dan integrasi antarnegara sebagai pencegah perang. Kant menyatakan bahwa republik (pemerintahan perwakilan) akan cenderung menghindari perang karena pemimpinnya akuntabel kepada warga. Michael Doyle (1986) menegaskan bahwa ketika warga negara menanggung beban perang melalui pajak dan korban, para pemimpin demokratis enggan menerjunkan negaranya ke konflik, sebab "ketika warga yang menanggung beban perang memilih pemerintahnya, perang menjadi mustahil". Pandangan ini mengimplikasikan bahwa perluasan demokrasi di antara negara-negara dapat mencegah perang antarnegara demokratis.

Selain demokrasi, liberalisme menyoroti *economy interdependency* sebagai faktor penghambat konflik. Robert Keohane dan Joseph Nye (1977) mengenalkan konsep "*complex*

interdependency” di mana negara saling terhubung lewat banyak kanal ekonomi dan sosial, sehingga penggunaan kekuatan militer menjadi kurang relevan. Neoliberalisme menekankan bahwa negara lebih mengutamakan keuntungan absolut ketimbang keuntungan relatif; artinya, kerja sama yang memberikan keuntungan bersama lebih diutamakan daripada bersaing untuk unggul dibanding orang lain. Keohane (1984) mencontohkan tiga manfaat institusi internasional: menurunkan biaya koordinasi, menaikkan biaya pengkhianatan, dan menyebarkan informasi. Dengan demikian, hubungan perdagangan dan investasi antarpemerintah (absolute gains) membuka ruang bagi interaksi positif (positif-sum) di mana setiap pihak sama-sama mendapat keuntungan, sehingga konflik menjadi kurang menarik secara ekonomi.

Teori liberal menempatkan institusi internasional (seperti PBB, WTO, ASEAN, Uni Eropa) sebagai kunci penting dalam mencegah konflik. Keohane (1998) menggarisbawahi bahwa institusi berfungsi “menciptakan kemampuan bagi negara-negara untuk bekerja sama dengan saling menguntungkan dengan cara mengurangi biaya membuat dan menegakkan kesepakatan”. Dalam kerangka liberal, institusi seperti ini membantu memperkuat norma dan keteraturan internasional, aturan bersama dan mekanisme resolusi sengketa memaksa pemerintah menepati komitmen mereka (reciprocity). Keohane menekankan bahwa bahkan kekuatan besar pun sering mematuhi aturan institusional karena dengan begitu perilaku negara lain menjadi lebih terduga. Sebagai contoh, kerja sama melalui NATO, Uni Eropa, atau WTO menyediakan forum negosiasi, penyelesaian perselisihan, dan pengawasan kepatuhan, yang membantu menjaga stabilitas sekaligus menghubungkan keamanan dan ekonomi antar negara.

Institusi juga menyediakan *kerangka normatif* untuk mengurangi mispersepsi. Liberalisme mempercayai bahwa organisasi internasional dapat memfasilitasi kepercayaan dan transparansi di antara negara, sehingga mencegah eskalasi konflik. Kerja sama dalam isu global (misalnya perubahan iklim, perdagangan, kesehatan) membangun saling ketergantungan yang

lebih luas. Joseph Nye (2004) menambahkan dimensi soft power di mana negara memproyeksikan daya tarik budaya dan nilai; kekuatan ini juga dapat menciptakan pengaruh tanpa konfrontasi militer. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai “kemampuan untuk mencapai tujuan melalui daya tarik daripada pemaksaan”. Negara demokratis sering menggunakan diplomasi, bantuan ekonomi, dan citra positif sebagai bagian dari kekuatan lunak, yang menurut liberalisme dapat mengurangi insentif perang.

Kerjasama ekonomi antarnegara seperti perdagangan bebas, investasi, dan integrasi pasar sangat ditekankan oleh para liberal sebagai penahan konflik. Prinsip liberalisme komersial menegaskan bahwa ketika negara saling bergantung secara ekonomi, biaya oportunitas perang menjadi terlalu tinggi. Hubungan dagang menciptakan keuntungan bersama (absolute gains) yang menurut Keohane dan Nye memperkuat hubungan damai. Contohnya, negara anggota Uni Eropa yang terintegrasi ekonominya cenderung lebih menghindari konflik bersama karena saling membutuhkan pasar dan modal. Kerjasama Internasional dan Perdagangan Internasional. liberalisme juga mengakui bahwa *interdependency* dapat dimanfaatkan sebagai senjata (“weaponized interdependence”); oleh karena itu dibutuhkan institusi kuat dan diversifikasi. Kerjasama ekonomi melalui institusi multilateral (misalnya WTO) dan perjanjian bilateral menambah lapisan jaminan bahwa kepentingan komersial tidak dibumbui ancaman kekerasan.

Dari perspektif liberal, penyebab konflik antarnegara sering kali terletak pada kegagalan demokratisasi, lemahnya institusi internasional, dan kurangnya integrasi ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan konflik menurut aliran ini adalah melalui memperluas demokrasi (mengikuti *perpetual peace* Kant), meningkatkan saling ketergantungan ekonomi (*complex interdependency*) serta memperkuat institusi dan norma internasional. Pandangan liberal mengajak bahwa tindakan bersama seperti perjanjian keamanan, perdagangan bebas, dan diplomasi multilateral akan meredam ambisi konflik dan memajukan stabilitas global

Kerja sama internasional merupakan aspek penting dalam studi Hubungan Internasional (HI), yang merujuk pada bentuk kolaborasi antarnegara untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam bentuk ekonomi, militer, politik, maupun kemanusiaan. Kerja sama internasional tergambar dalam hubungan antara Jerman dan Ukraina yang mengalami intensifikasi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Kerja sama ini terutama berfokus pada sektor energi terbarukan, bantuan kemanusiaan, dan dukungan teknis sebagai bagian dari upaya Jerman dan Uni Eropa untuk memperkuat ketahanan regional dan mengurangi ketergantungan pada Rusia.

Dari perspektif realisme, kerja sama internasional bukanlah bentuk idealisme altruistik, melainkan strategi pragmatis yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka dalam sistem internasional yang anarkis (Waltz, 1979). Realisme memandang bahwa kerja sama hanya akan terjadi jika negara menganggapnya bermanfaat bagi keamanan atau kekuatan mereka, dan bila risiko ditinggalkan lebih besar daripada partisipasi. Kerja sama Jerman dengan Ukraina pasca-invasi Rusia tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi strategis, Jerman yang sebelumnya sangat tergantung pada energi Rusia, menyadari bahwa keberlanjutan pasokan energi tidak bisa lagi dijamin dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, Jerman mulai memperkuat hubungan bilateral dengan Ukraina, termasuk melalui dukungan dalam pembangunan kembali infrastruktur energi dan transfer teknologi energi terbarukan. Dalam konteks realisme, kerja sama ini tidak sekadar bantuan, melainkan langkah untuk mengamankan sumber energi alternatif dan menyeimbangkan kekuatan terhadap Rusia.

Teori realisme klasik, seperti yang dijelaskan oleh Morgenthau (1948), menyatakan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika keseimbangan kekuasaan dipertahankan. Kerja sama Jerman dengan Ukraina, meskipun terlihat sebagai dukungan solidaritas, dapat pula dipahami sebagai upaya strategis untuk memperkuat posisi Jerman dalam sistem internasional yang mengalami

perubahan drastis akibat konflik. Dengan memperkuat Ukraina sebagai mitra energi, Jerman juga memperlemah posisi tawar Rusia di sektor energi, khususnya di Eropa Timur.

Kerja sama ini juga terkait erat dengan kebijakan energi dan ekonomi Jerman. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan sanksi terhadap Rusia, kerja sama internasional menjadi alat penting bagi Jerman untuk mendiversifikasi sumber energi dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Bantuan ke Ukraina dalam bentuk dana, infrastruktur, dan teknologi bukanlah tindakan idealistis, tetapi strategi untuk menurunkan risiko ketergantungan jangka panjang pada musuh geopolitik (Mearsheimer, 2014). Hal ini sesuai dengan prinsip realisme ofensif, bahwa negara-negara besar akan menggunakan segala instrumen, termasuk kerja sama, untuk memaksimalkan keamanan.

Kerja sama internasional juga terlihat dalam kerangka Uni Eropa, di mana negara-negara anggota memberikan dukungan kolektif kepada Ukraina dan menyusun sanksi ekonomi terhadap Rusia. Namun dari sudut pandang realisme, tindakan kolektif ini hanya mungkin terjadi karena negara-negara anggota melihat adanya ancaman langsung terhadap stabilitas regional dan kepentingan nasional masing-masing (Waltz, 1979). Dengan kata lain, aliansi atau institusi internasional tidak bertindak atas dasar moral, melainkan kepentingan bersama yang selaras dengan kepentingan individu negara.

Kerja sama antara Jerman dan mitra-mitra global lain seperti Amerika Serikat dan Norwegia dalam pengadaan LNG (liquefied natural gas) juga merupakan manifestasi dari kerja sama berbasis realis. Dalam hal ini, Jerman berusaha membangun jaringan aliansi energi yang dapat memberikan jaminan pasokan di tengah krisis global, yang sebenarnya berakar pada persaingan geopolitik dengan Rusia. Langkah ini memperkuat argumen bahwa kerja sama internasional, meskipun tampak kooperatif, sesungguhnya merupakan alat dalam memperkuat posisi kekuatan negara.

Dengan demikian, kerja sama internasional seperti yang terjadi antara Jerman dan Ukraina atau dalam kerangka Uni Eropa tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan kepentingan dalam sistem internasional. Teori realisme memberikan pemahaman bahwa kerja sama bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keamanan dan dominasi dalam lingkungan global yang tidak pasti. Dalam situasi seperti konflik Rusia-Ukraina, kerja sama justru menjadi bagian dari strategi realistis negara untuk bertahan dan unggul dalam kompetisi antar kekuatan besar.

Perdagangan internasional merupakan salah satu elemen kunci dalam hubungan antarnegara yang menghubungkan kepentingan ekonomi domestik dengan dinamika global. Dalam konteks Hubungan Internasional, dari perspektif realisme, perdagangan dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kekuatan nasional dan menjaga keamanan negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis (Waltz, 1979). Negara akan terlibat dalam perdagangan selama itu menguntungkan bagi kepentingan strategisnya, dan akan menarik diri jika perdagangan dianggap mengancam stabilitas atau kedaulatannya.

Dalam kasus Jerman, ketergantungannya pada ekspor dan impor energi dari Rusia memperlihatkan risiko strategis ketika hubungan politik memburuk. Rusia sebagai negara eksportir energi memanfaatkan posisi dominannya untuk mengancam dan mengendalikan perilaku negara-negara konsumen, termasuk Jerman. Ketika invasi ke Ukraina terjadi, Rusia mengurangi pasokan gas alam ke Eropa sebagai respons terhadap sanksi ekonomi dari negara-negara Barat, termasuk Jerman. Tindakan ini membuktikan bahwa perdagangan energi tidak netral, melainkan syarat dengan kalkulasi kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh pendekatan realisme.

Seperti yang diungkapkan oleh Morgenthau (1948), menekankan bahwa negara harus selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan negara lain, termasuk dalam bidang ekonomi,

karena setiap hubungan membawa potensi dominasi. Dalam konteks ini, perdagangan internasional bukanlah simbol kepercayaan antarnegara, melainkan alat untuk meningkatkan atau mempertahankan posisi dalam sistem internasional yang kompetitif. Ketika Jerman mulai menghentikan kerja sama perdagangan dengan Rusia, khususnya dalam sektor energi, langkah ini tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga keputusan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada aktor yang tidak stabil dan agresif.

Transisi Jerman menuju diversifikasi sumber energi dan peningkatan impor LNG dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Norwegia juga mencerminkan strategi realistis dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Diversifikasi ini memungkinkan Jerman untuk mempertahankan daya saing industri dan keamanan ekonominya tanpa bergantung pada negara yang secara geopolitik bertentangan. Dalam pandangan realis ini adalah bentuk balancing terhadap ancaman eksternal, di mana perdagangan dijalankan secara selektif berdasarkan perhitungan keuntungan dan risiko keamanan. penurunan ekspor Jerman ke Rusia khususnya di sektor mesin dan otomotif dapat dimaknai sebagai konsekuensi logis dari ketegangan politik yang tak terhindarkan dalam perdagangan internasional. Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pusat, negara harus bersiap menghadapi dinamika ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan dan bukan sekadar permintaan pasar (Mearsheimer, 2014). Oleh karena itu, strategi ekspor dan impor Jerman pascainvasi tidak hanya disesuaikan berdasarkan pasar, tetapi juga atas pertimbangan geopolitik dan keamanan nasional.

Perdagangan internasional juga digunakan oleh Jerman sebagai sarana untuk memperkuat aliansi strategis dengan Ukraina. Bantuan teknis dan kerja sama di bidang energi terbarukan bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi Jerman di Eropa Timur dan menekan pengaruh Rusia. Ini sejalan dengan argumen realisme ofensif bahwa negara besar akan memanfaatkan instrumen ekonomi untuk memperluas pengaruh politiknya dalam sistem internasional (Mearsheimer, 2014).

Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan kepentingan nasional. Dalam perspektif realisme, negara tidak berdagang demi idealisme pasar bebas, melainkan untuk memastikan keamanan dan memperkuat posisi dalam sistem global yang penuh ketidakpastian. Jerman sebagai negara besar di Eropa menjadikan perdagangan sebagai alat utama dalam mengelola tantangan geopolitik, termasuk konflik Rusia-Ukraina, untuk melindungi stabilitas nasional dan hegemoninya di kawasan.

Keamanan Energi dan Perekonomian Jerman

Keamanan energi dan perdagangan internasional merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat, khususnya dalam konteks globalisasi dan ketergantungan antarnegara. dijelaskan bahwa krisis energi akibat invasi Rusia ke Ukraina berdampak besar pada struktur perdagangan Jerman, terutama karena negara tersebut sangat bergantung pada impor gas alam dari Rusia sebelum konflik terjadi. Ketika pasokan energi terganggu, sektor industri dan ekspor Jerman turut terdampak, menegaskan bahwa stabilitas energi merupakan fondasi utama bagi kelangsungan perdagangan internasional. Dari sudut pandang teori realisme, hubungan antara keamanan energi dan perdagangan internasional dilihat dalam kerangka kepentingan nasional dan kekuasaan. Negara tidak hanya berdagang untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat posisi strategisnya dalam sistem internasional yang bersifat anarkis (Waltz, 1979). Ketergantungan Jerman pada energi Rusia menjadi kelemahan strategis yang dimanfaatkan oleh Rusia untuk menekan negara-negara Eropa, menunjukkan bahwa perdagangan energi dapat digunakan sebagai alat politik dan bukan sekadar mekanisme pasar bebas (Mearsheimer, 2014).

Langkah Jerman untuk mempercepat transisi energi dan mencari mitra dagang baru seperti Amerika Serikat dan Norwegia dalam pengadaan LNG menunjukkan respons realistik terhadap ancaman eksternal. Diversifikasi pasokan energi menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat keamanan nasional dan menjaga kelangsungan perdagangan yang stabil. Hal ini

membuktikan bahwa dalam sistem internasional, negara akan menyesuaikan kebijakan perdagangannya demi mempertahankan kontrol atas sumber daya vital. Oleh karena itu, dalam kaca mata realisme, keamanan energi bukan hanya isu teknis, tetapi bagian dari kompetisi kekuasaan global yang sangat menentukan arah kebijakan perdagangan internasional suatu negara.

Ketergantungan pada energi fosil, khususnya gas alam, telah lama menjadi kelemahan strategis dalam hubungan ekonomi dan politik internasional. Negara-negara seperti Rusia memanfaatkan dominasi mereka di sektor energi untuk mempengaruhi perilaku negara lain, termasuk melalui pengurangan pasokan sebagai bentuk tekanan politik, sebagaimana terjadi terhadap Jerman pasca-invasi ke Ukraina. Dalam sistem internasional yang anarkis, tindakan semacam ini merupakan wujud nyata dari penggunaan ekonomi sebagai instrumen kekuasaan, dan memperkuat asumsi realis bahwa tidak ada ruang aman dalam interaksi antarnegara. Negara tidak dapat mengandalkan niat baik pihak lain, melainkan harus mempersiapkan diri menghadapi kontingensi dengan memperkuat kemandirian dan fleksibilitas ekonomi (Waltz, 1979).

Ketidakpastian dalam pasokan energi juga berdampak pada posisi tawar negara dalam sistem perdagangan global. Seperti yang dikemukakan oleh Goldthau dan Sitter (2015), perdagangan energi bukan hanya masalah harga dan suplai, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang mengontrol infrastruktur distribusi dan akses pasar. Dalam kasus Jerman, gangguan perdagangan dengan Rusia telah memaksa pemerintah untuk menjajaki hubungan baru dengan mitra dagang yang lebih stabil secara politik. Langkah ini memperkuat argumen realisme bahwa kerja sama perdagangan hanya akan berlangsung jika tidak mengancam keamanan negara dan apabila keuntungan strategis dapat dipastikan.

Oleh karena itu, ketahanan energi menjadi komponen utama dalam desain kebijakan luar negeri Jerman di tengah krisis geopolitik. Reformasi kebijakan energi Jerman juga

menggambarkan bagaimana negara mengintegrasikan logika kekuasaan ke dalam strategi perdagangan. Peningkatan investasi pada energi terbarukan dan pembangunan terminal LNG merupakan respons tidak hanya terhadap ancaman pasokan jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat otonomi ekonomi dan mengurangi leverage politik pihak lawan (International Energy Agency [IEA], 2022). Dengan demikian, dalam kerangka realisme, perdagangan internasional yang sehat tidak bisa dipisahkan dari keamanan energi yang kuat. Negara-negara yang tidak mampu mengamankan kebutuhan energi domestiknya akan selalu berada dalam posisi rentan dalam tatanan ekonomi global.

Liberalisme dalam studi hubungan internasional memandang perdagangan bebas dan *economy interdependency* sebagai fondasi kerja sama global. Setelah runtuhnya Uni Soviet, tatanan liberal global yang dipimpin AS menekankan perdagangan bebas dan lembaga multilateral untuk menghubungkan pasar-pasar dunia, sehingga mengalirnya barang, informasi, dan modal diyakini meningkatkan kemakmuran kolektif. Perdagangan internasional dianggap sebagai pendorong stabilitas: perluasan perdagangan dipandang dapat mendorong kemakmuran bersama dan mereduksi ketegangan global. Pandangan liberal ini juga diterapkan pada isu energi: sumber energi dianggap sebagai komoditas global yang dapat memberikan keuntungan saling mengisi (*positive-sum*). Sebagai contoh, Proedrou (2012) menegaskan bahwa energi dalam pasar terintegrasi dan saling ketergantungan antarpemangku kepentingan dapat menjadi *positive-sum game*, mendorong kooperasi ketimbang konflik. Kerangka liberalisme menekankan bahwa negara-negara yang saling tergantung pasokan energinya akan memiliki insentif untuk saling menjaga stabilitas pasokan dan mencegah konflik.

Liberal institusionalis menyoroti peran lembaga internasional dan kerja sama multilateral dalam menjaga ketahanan energi. Lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Badan Energi Internasional (IEA), serta mekanisme Uni Eropa (misalnya Pasar Energi Tunggal dan Energy Union) berfungsi sebagai wadah pengaturan aturan perdagangan energi dan

mendorong standar bersama. Melalui badan-badan ini, negara dapat melakukan koordinasi kebijakan energi, pertukaran informasi, serta penerapan langkah kolektif seperti cadangan energi strategis bersama. Misalnya, deklarasi bersama AS-Jerman terkait Nord Stream II menekankan kesiapan kedua pihak mengenakan sanksi jika Rusia menggunakan energi sebagai senjata, sekaligus menegaskan komitmen menjaga keamanan energi Ukraina dan Eropa Tengah sesuai prinsip-prinsip regulasi UE.

Hal ini mencerminkan pandangan liberal bahwa institusi dan kerja sama transnasional akan membantu mengatasi kerentanan pasokan energi dan menjaga stabilitas ekonomi global. Secara keseluruhan, teori liberalisme menempatkan keterbukaan perdagangan dan interdependensi sebagai jalan mencapai ketahanan energi: dengan pasar energi yang terbuka dan kerangka institusional yang kuat, negara-negara diharapkan dapat saling menguntungkan dan memelihara kestabilan pasokan bersama. Jerman menjadi contoh penting penerapan prinsip-prinsip di atas. Sepanjang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Jerman mengadopsi kebijakan liberal yang tinggi: perdagangan ekspor yang kuat, ekonomi terbuka, dan mengandalkan gas alam Rusia sebagai sumber energi utama. Stelzenmüller (2022) mencatat bahwa Jerman sebenarnya merupakan *studi kasus* negara Barat yang menempatkan diri pada interdependensi: pertumbuhan ekspor kepada China dan ketergantungan energi kepada Rusia menjadi strategi ekonomi Jerman. Dalam kondisi normal, ketergantungan ini sejalan dengan rasional ekonomi liberal: gas Rusia yang murah mendukung pertumbuhan industri Jerman. invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 memicu krisis tajam. Rusia yang dulunya pemasok utama gas Jerman tiba-tiba menjadi subjek sanksi Barat yang mencabut sebagian besar pasokan energi ke Eropa Barat. Akibatnya, Jerman menemukan dirinya sangat rentan ketika aliran gas putus.

Sebagai respons, kebijakan Jerman dan Eropa bergeser menuju keamanan pasokan (security of supply). Dalam beberapa hari setelah invasi, Jerman mempercepat diversifikasi sumber energi. Terminal LNG terapung diumumkan hanya tiga hari pascainvasi, dan dalam 10

bulan pertama sudah beroperasi unit FSRU pertama di Jerman. Pemerintah juga mengesahkan “Gas Storage Act” dan rencana darurat gas untuk membangun cadangan strategis, serta bernegosiasi dengan AS, Qatar, dan pemasok baru lain untuk kontrak pasokan jangka panjang. Jerman meningkatkan impor gas dari negara tetangga melalui pipa, menghemat konsumsi energi (penggunaan pemanas dan industri diatur lebih ketat), serta memperpanjang operasi dua dari tiga pembangkit nuklir yang semula akan dipensiunkan demi menekan defisit pasokan.

Melalui langkah-langkah tersebut tampak bahwa praktik Jerman pascakonflik mengombinasikan pendekatan liberal dan realistis. Dari sisi liberal, Jerman tetap terlibat dalam kerangka Eropa dan global: misalnya, penerapan sanksi bersama, dukungan terhadap UE Energy Union, serta komitmen pada transisi energi berkelanjutan. Namun dari sisi realis, kebijakan lebih menekankan kepentingan nasional dan diversifikasi mandiri mengurangi ketergantungan pada satu sumber tunggal. Contohnya, pengembangan LNG domestik dan penimbunan stok energi dilakukan sebagai jaring pengaman nasional utama. Liberalisme percaya bahwa rangkaian hubungan ekonomi dan institusional antarnegara mendorong kepentingan bersama yang mereduksi insentif konflik. Sejalan dengan ini, kestabilan pasokan energi dianggap akan tercapai apabila negara-negara terus mempertahankan keterbukaan perdagangan dan kerja sama multilateral. Sebagai contoh, liberalisme akan mendukung pembentukan jaringan perdagangan gas trans-regional dan cadangan energi kolektif yang mengikat banyak negara, sehingga gangguan pasokan dapat diatasi melalui gotong royong.

Sebaliknya, perspektif realis melihat isu keamanan energi sebagai arena persaingan kekuasaan dan kepentingan nasional. Dari kacamata ini, sumber energi bersifat zero-sum: keuntungan satu negara atas sumber energi otomatis berarti kerugian pihak lain. Realisme menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara harus memprioritaskan pengamanan kebutuhan energi sendiri dan siap menghadapi konflik sumber daya. Hal ini tercermin ketika Jerman, yang terbukti rentan, menempuh langkah-langkah protektif seperti

memperkuat penyimpanan domestik dan diversifikasi pasokan secara sepihak. Selain itu, realisme mendukung penggunaan instrumen kekuasaan seperti sanksi ekonomi atau pengaturan pembatasan ekspor energi untuk melindungi kepentingan nasional.

Dapat dilihat bahwa realisme lebih menekankan aspek persaingan dan kontrol, sedangkan liberalisme menekankan kerja sama dan aturan bersama. Persoalan keamanan energi pascaperang Ukraina mengilustrasikan bahwa kedua pendekatan memiliki relevansinya. Sisi liberal tetap berperan melalui koordinasi internasional (misalnya kerangka EU dan kemitraan transatlantik dalam menangani krisis energi, ketahanan energi nasional yang diwarnai realisme juga menjadi landasan kebijakan cepat (seperti pengembangan LNG lokal dan kebijakan penghematan). Kedua teori tersebut pada akhirnya saling melengkapi: institusi dan kerja sama global (liberalisme) sangat penting untuk mengelola keamanan energi jangka panjang di tingkat global, sementara perhatian terhadap kepentingan nasional (realisme) krusial ketika menghadapi ancaman pasokan yang mendadak. Pandangan liberalisme menggarisbawahi keterkaitan erat antara stabilitas pasokan energi dan keterbukaan perdagangan serta kerangka institusional internasional. Dengan ekonomi terbuka dan aturan global, negara diharapkan menjaga pasokan energi bersama dan menanggulangi goncangan bersama-sama. Pendekatan ini berbeda dengan realisme yang menyoroti sisi kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai faktor utama. Dalam kasus Jerman, pola kebijakan terkini menunjukkan keseimbangan antara kedua logika tersebut: kerja sama multilateral dilanjutkan, tetapi kebijakan ketahanan energi nasional ditegakkan sebagai prioritas.

Penelitian Terkait

Sebagai landasan penelitian, penelitian ini menggunakan sejumlah penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan konsep dan isu yang dikaji:

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian
-------------------------	----------------	--------------	-------------------------

Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe	Ruth Endam Mbah dan Divine Forcha Wasum	2022	Dampak ekonomi yang dirasakan oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa akibat konflik Rusia Ukraina pada tahun 2022
Global Economic Consequence of Russian Invasion of Ukraine	Peterson K. Ozili	2022	Dampak konflik Rusia Ukraina pada tahun 2022 terhadap ekonomi global
German-Russian Gas Relations: A Special Relationship in Troubled Waters	Aurélie Bros, Tatiana Mitrova, dan Kirsten Westpha	2017	Perkembangan dinamika hubungan Jerman dan Rusia di sektor gas alam
The 2014 Ukraine Russia Crisis: Implications for Energy Markets and Scholarship	Andreas Goldthau dan Tim Boersma	2014	Proposal kebijakan energi untuk merespon konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2014

Penelitian pertama adalah artikel berjudul “*Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe*” yang ditulis oleh Ruth Endam Mbah dan Divine Forcha Wasum dan dimuat dalam jurnal ilmiah *Advances in Social Sciences Research Journal* volume 9 nomor 3 yang diterbitkan pada Maret 2022. Artikel ini membahas tentang dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik Rusia Ukraina pada tahun 2022, khususnya bagi Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa yang memegang peranan penting dalam perekonomian global. Bagi Amerika Serikat, konflik Rusia-Ukraina memicu terjadinya kenaikan tingkat inflasi akibat lonjakan harga minyak dan bahan pangan, instabilitas indeks saham, dan gangguan pasokan untuk berbagai jenis logam yang diperlukan dalam proses industri. Bagi Kanada, konflik Rusia-Ukraina memicu terjadinya

kenaikan harga bahan pangan dan bahan bakar, instabilitas indeks saham, dan penurunan minat investor untuk menjalin hubungan dagang dengan Ukraina akibat kekhawatiran terkait risiko politik. Bagi Inggris, konflik Rusia Ukraina memicu terjadinya kenaikan tingkat inflasi akibat lonjakan harga minyak dan bahan pangan serta gangguan rantai pasokan. Bagi Uni Eropa, konflik Rusia-Ukraina memicu terjadinya kenaikan tingkat inflasi, gangguan rantai pasokan, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat lonjakan harga komoditas energi dan menurunnya kepercayaan di sektor bisnis.

Penelitian kedua adalah *research paper* berjudul “*Global Economic Consequence of Russian Invasion of Ukraine*” yang ditulis oleh Peterson K. Ozili dan dipublikasikan oleh *Social Science Research Network* pada April 2022. *Research paper* ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022 terhadap ekonomi global. *Spillover effects* di sektor ekonomi membuat negara-negara yang bahkan sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina turut merasakan sejumlah dampak: (1) Gangguan rantai pasokan akibat embargo berbagai komoditas ekspor dan impor serta hambatan dalam operasi pengiriman lintas batas; (2) Kenaikan harga komoditas energi akibat gangguan pasokan; (3) Gangguan dalam sistem perbankan internasional, khususnya bagi bank-bank asing yang memiliki operasi berskala besar di Rusia; (4) Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat lonjakan harga komoditas energi, peningkatan biaya produksi, dan penurunan permintaan pasar; dan (5) Inflasi dan peningkatan biaya hidup. Artikel “*Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe*” (2022) dan *research paper* “*Global Economic Consequence of Russian Invasion of Ukraine*” (2022) mengkaji tentang dampak yang ditimbulkan oleh konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022 di sektor ekonomi, baik yang bersifat global maupun dampak yang spesifik bagi sejumlah negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak yang dirasakan oleh

Jerman di sektor energi—termasuk *spillover effects* di sektor-sektor lain—akibat konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022.

Penelitian keempat adalah *research paper* berjudul “*German-Russian Gas Relations: A Special Relationship in Troubled Waters*” yang ditulis oleh Aurélie Bros, Tatiana Mitrova, dan Kirsten Westphal dan dipublikasikan oleh *German Institute for International and Security Affairs* pada Desember 2017. *Research paper* ini membahas tentang empat fase perkembangan hubungan Jerman dan Rusia di sektor gas alam: (1) Fase Pertama (1960-1990), Jerman dan Rusia menyepakati hubungan kerja sama untuk mencapai agenda politik dan ekonomi masing-masing; (2) Fase Kedua (1990-2009), ekspansi infrastruktur dan jaringan pipa gas alam yang didorong oleh perkembangan joint venture; (3) Fase Ketiga (2009-2014), transformasi pasar energi Uni Eropa dan pemberlakuan kebijakan *Energiewende* mulai menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan Jerman dan Rusia; dan (4) Fase Keempat (pasca-2014), konflik Rusia-Ukraina menghadirkan ancaman geopolitik yang membuat banyak pihak mulai meragukan reliabilitas Rusia sebagai mitra kerja sama.

Penelitian keempat adalah artikel berjudul “*The 2014 Ukraine-Russia Crisis: Implications for Energy Markets and Scholarship*” yang ditulis oleh Andreas Goldthau dan Tim Boersma dan dimuat dalam jurnal ilmiah *Energy Research & Social Science* volume 3 yang diterbitkan pada September 2014. Artikel ini membahas tentang tiga proposal kebijakan yang diajukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2014 di sektor energi, yaitu mengimpor LNG dari Amerika Serikat apabila terjadi gangguan pasokan, integrasi sistem energi yang dikendalikan oleh Komisi Eropa, dan pemberlakuan sanksi yang menargetkan sektor energi Rusia. Proposal-proposal kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan realitas pasar energi karena mengabaikan sejumlah fakta: (1) Biaya pengurusan lisensi dan pembangunan terminal LNG yang mencapai miliaran dolar, sulitnya penyaluran gas alam ke wilayah-wilayah yang belum terintegrasi dengan baik, kurangnya

harmonisasi kebijakan pasar, dan harga gas alam yang masih ditentukan oleh negara di beberapa wilayah membuat Uni Eropa belum siap untuk sepenuhnya beralih ke LNG yang diimpor dari Amerika Serikat; (2) Dominasi negara dalam penyediaan layanan dan penetapan harga komoditas energi bertentangan dengan prinsip liberalisasi pasar yang diterapkan oleh Uni Eropa; (3) Integrasi sistem energi berpotensi menciptakan ketidakadilan karena perbedaan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing negara; dan (4) Mustahil untuk menyingkirkan salah satu produsen energi terbesar di dunia.